

ABSTRAK

Kasus pembobolan *rekening dormant* di BNI Cabang Batujajar dengan nilai kerugian mencapai Rp204 miliar menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap nasabah korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum bank tidak dapat dibebankan kepada BNI sebagai institusi karena bank telah mematuhi kewajiban regulasinya dengan mengklasifikasikan *rekening dormant* dan membatasi akses transaksinya. Pembobolan terjadi akibat tindakan oknum Kepala Cabang Pembantu dan mantan pegawai yang dengan sengaja melanggar prosedur internal serta bertindak di luar kewenangan (*ultra vires*). Dengan demikian, tanggung gugat perdata dan sanksi administratif tidak dapat dijatuhkan kepada bank, sedangkan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya menjadi beban para pelaku yang dijerat dengan Pasal 30 jo. Pasal 67 UU ITE, Pasal 363 KUHP, dan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal bank, penerapan sistem deteksi dini transaksi mencurigakan, serta peningkatan literasi hukum nasabah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Bank, *Rekening Dormant*, Pembobolan, BNI Batujajar

ABSTRACT:

*The case of the breach of dormant accounts at BNI Batujajar Branch, with losses reaching Rp204 billion, has drawn public attention and raised crucial questions regarding the form of the bank's legal responsibility toward the victim customers. This study aims to analyze the bank's legal responsibility based on the prevailing laws and regulations, particularly POJK Number 24 of 2025 concerning the Management of Accounts at Commercial Banks and POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Employing normative juridical research methods through statutory and conceptual approaches, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the form of the bank's legal responsibility cannot be imposed on BNI as an institution because the bank has complied with its regulatory obligations by classifying dormant accounts and restricting their transaction access. The breach occurred due to the actions of a rogue Sub-Branch Head and a former employee who deliberately violated internal procedures and acted beyond their authority (*ultra vires*). Accordingly, civil liability and administrative sanctions cannot be imposed on the bank, whereas criminal liability falls entirely upon the perpetrators, who are charged under Article 30 in conjunction with Article 67 of the ITE Law, Article 363 of the Criminal Code, and Article 49 of the Banking Law. This study recommends strengthening the bank's internal oversight systems, implementing early detection systems for suspicious transactions, and improving customer legal literacy.*

Keywords: Legal Responsibility, Bank, Dormant Accounts, Breach/Theft, BNI Batujajar